

Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Risnalamelan Agifirilarani¹, Ardiansyah Japlani², Karnila Ali³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Metro

Email: risnalamellan04@gmail.com¹, ardiansyahjaplani@gmail.com²,
karnilaali888@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori manajemen keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuisisioner yang dibagikan kepada aparatur desa dan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan sampel aparatur desa yang bekerja pada Kantor Kelurahan Desa Gedung Gumanti, Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu aparatur yang memiliki gelar minimal SMP/MTS dan memiliki masa kerja lebih dari satu tahu. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Kompetensi juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This research aims to examine the influence of Community Participation, Competence and Internal Control Systems on Accountability in Village Fund Management. This research uses financial management theory. The data used in this research is primary data based on questionnaires distributed to village officials and the community. This research method uses a sample of village officials who work at the Gedung Gumanti Village Subdistrict Office. The sample in this research is 30 people, based on a purposive sampling method, namely officials who have a minimum of SMP/MTS degree and have worked for more than one year. The choice of hypothesis testing in this research uses multiple linear regression. The results of this research show that Community Participation and the internal control system have a positive effect on Village Fund Management Accountability, while Competency also has a positive effect on Village Fund Management Accountability.

Keywords: *Community Participation, Competence, Internal Control System, Accountability In Village Fund Management.*

I. Pendahuluan

UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan salah satu tujuan pengaturan desa yaitu membentuk pemerintahan desa yang efektif dan efisien, terbuka, serta tanggung jawab. Dalam melaksanakan programnya pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dan hak untuk mempercepat peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan memberdayakan semua potensi

yang ada sehingga tidak bertentangan dengan norma, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain memiliki hak untuk menjalankan anggaran pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *Good Governance* serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat atas adanya dana desa tersebut (Irma, 2021)

Desa juga merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah perdesaan dalam bentuk dana desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa agar tercipta akuntabilitas yang baik.

Partisipasi masyarakat adalah komponen yang memberi pengaruh atas tercapainya program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Program kerja pemerintahan baik dalam pembangunan sosial kemasyarakatan ataupun infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada sasaran dan masukan kebijakan namun masyarakat desa ikut aktif dalam menggali potensi dan permasalahan disetiap kegiatan program sehingga terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dapat terwujud. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada saran dan masukan kebijakan namun masyarakat desa ikut aktif dalam menggali potensi dan permasalahan disetiap kegiatan program sehingga terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa terwujud (Syamsi, 2014; dan Novia, 2015).

Kompetensi merupakan suatu personalitas yang meliputi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan ketika merealisasikan sesuatu. Dalam upaya meningkatkan kemampuan aparatur desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi sehingga tersedianya sumber daya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kinerja aparatur desa yang bertanggung jawab dan mampu memberikan efek positif terhadap kinerja pemerintahan. Kompetensi juga merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi sehingga tersedianya sumber daya yang handal adalah sebuah keniscayaan (Sumampow et al., 2017).

Aturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 terkait (SPIP) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengidentifikasi proses dimana organisasi menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang amanah. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 22 Tahun 2005).

Pengalokasian dana desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota sebelum dipindahkan ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota diatur oleh peraturan

perundang-undangan pengelolaan daerah, dan pengelolaan dana desa dalam APBDesa diatur oleh peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan dana desa sebagai stimulus atau dana perangsang bertujuan untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa yang didukung oleh partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, banyak masalah tampak dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa menetapkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai perwakilan dari masyarakat desa, partisipasi masyarakat sangat besar karena mereka adalah tokoh masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa, yang didirikan oleh masyarakat, dan pemerintah di atasnya pemerintah kabupaten/kota. BPD melakukan tugas yang sangat strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa tidak disalah gunakan atau diselewengkan. Ini memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan dana desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintah desa diatur dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Desa Gedung Gumanti merupakan pemekaran kecamatan pada 26 mei 1999, yang mayoritas penduduknya masyarakat lampung pubian. Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pengelolaan alokasi dana desa hanya berkonsentrasi pada bidang kesehatan, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sumber air bersih milik desa dan tunjangan aperatur desa. Prasarana lain seperti pembangunan sanitasi (budaya hidup bersih yang disengaja), belum diperhatikan dengan baik dan masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena terkendala alokasi dana desa. Dapat disimpulkan bahwa, selain kekurangan dana ADD, dana yang diperoleh hanya dialokasikan untuk oprasional desa, belanja aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah 15 perangkat desa dan 15 masyarakat, sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuisisioner yang diberikan kepada perangkat desa yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji koefisiensi determinasi, uji f, dan uji t.

III. Hasil dan Pembahasan
A. Hasil

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	67.549	3.468		19.476	.000
Partisipasi Masyarakat	-.826	.271	-3.245	-3.049	.005
Kompetensi	.720	.198	-3.112	-2.098	.003
Sistem Pengendalian Internal	.919	.293	3.341	3.140	.004

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data Primer diolah Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, bisa diidentifikasi sejumlah hal yaitu:

1. Skor konstanta sejumlah 67.549 mengatakan jika variabel independent dirasa konstan, sehingga rata APDD (Y) sejumlah 67, 549
2. Skor koefisien regresi variable Partisipasi Masyarakat (X1) sejumlah 0,826 menjelaskan jika tiap penambahan partisipasi masyarakat sejumlah 1000 dapat menambah Kepuasan Kerja sejumlah 826.
3. Skor koefisien regresi variabel Kompetensi (X2) sejumlah 0,720 menjelaskan jika tiap penambahan kompetensi sejumlah 1000 dapat menambah Kepuasan Kerja sejumlah 720.
4. Skor koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) sejumlah 0,919 menjelaskan jika tiap penambahan Sistem Pengendalian Internal sejumlah 1000 dapat menambah Kepuasan Kerja sejumlah 919.

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519 ^a	.270	.216	1.305

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah Peneliti Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,519. Hal ini mengidentifikasikan bahwa besar peran antara partisipasi masyarakat, kompetensi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,519 atau 51,9%.

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.992	2	8.496	4.986	.014 ^b
	Residual	46.010	27	1.704		
	Total	63.002	29			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah Peneliti Tahun 2024

Uji f memiliki kriteria untuk diterima atau ditolaknya suatu hipotesis yaitu apabila nilai sig < 0,05 maka diterima, namun apabila nilai sig > 0,05 maka ditolak. Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai sig yang diperoleh sebesar 0,014 yaitu 0,014 < 0,05 maka **Ha diterima dan Ho ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	67.549	3.468		19.476	.000
Partisipasi Masyarakat	-.826	.271	-3.245	-3.049	.005
Kompetensi	.720	.198	-3.112	-2.098	.003
Sistem Pengendalian Internal	.919	.293	3.341	3.140	.004

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data Primer diolah Peneliti Tahun 2024

Uji t memiliki kriteria apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak yaitu apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka hipotesis dapat diterima, namun apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Berdasarkan table diatas maka dapat dilihat bahwa variabel X1 (Partisipasi Masyarakat) memperoleh nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **Ha diterima dan Ho ditolak**. Kemudian pada variabel X2 (Kompetensi) memperoleh nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ dan pada variabel X3 (Siste Pengendalian Internal) memperoleh nilai sig sebesar $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa **Ha diterima dan Ho ditolak**. Sehingga terdapat pengaruh X1 (Partisipasi Masyarakat) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) dan terdapat pengaruh X2 (Kompetensi) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) serta terdapat pengaruh X3 (Sistem Pengendalian Internal) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa).

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh partisipasi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil uji t bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, karena penelitian menunjukkan Tingkat signifikansi pada literasi keuangan sebesar $0,005 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H1) yaitu terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa, mereka cenderung lebih memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, informasi tentang penggunaan dana desa menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Mereka akan memantau bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat juga meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Para pengelola dana desa akan merasa bertanggung jawab kepada masyarakat karena adanya tekanan dan pemantauan dari mereka. Dengan adanya partisipasi masyarakat, risiko penyalahgunaan dana desa cenderung berkurang. Masyarakat akan menjadi penjaga untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) mengenai dua macam akuntabilitas publik, salah satunya adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Partisipasi masyarakat ini merupakan bentuk pengawalan masyarakat terhadap tanggung jawan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dapat memicu peningkatan kualitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Dengan mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat, pengelola dana desa dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Pengelolaan dana desa yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih dianggap legitim oleh publik. Ini karena masyarakat merasa memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya penting untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaannya secara keseluruhan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cohen Naimah (2017) membedakan jenis partisipasi yaitu: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan menentukan alternatif masyarakat mengenai gagasan/ide mengenai kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini menyangkut bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjalankan suatu program seperti: kegiatan administrasi, dana, menggerakkan sumber daya, koordinasi dan menjabarkan program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, menyangkut hasil dari tercapainya program baik dari segi quality maupun quantity. Dari segi kualitas seperti peningkatan output, sedangkan segi kuantitas seperti presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan, tujuannya untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Umaira & Adnan, (2019), Aulia et al., (2018), Jannah et al., (2018), Perdana, (2018), Mada et al., (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh partisipasi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil uji t bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, karena penelitian menunjukkan Tingkat signifikansi pada literasi keuangan sebesar $0,003 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H_2) yaitu terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tingkat kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kompetensi aparat desa dalam memahami regulasi dan prosedur pengelolaan dana desa dapat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan dana. Mereka akan lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan dana dan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.

Aparat desa yang kompeten akan lebih mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menggunakan dana desa dengan efektif. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik. Kompetensi aparat desa

dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa akan memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Aparat desa yang kompeten akan lebih mampu menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat. Aparat desa yang kompeten akan lebih mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan kontrol internal yang efektif guna mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Sehingga tingkat kompetensi aparat desa juga akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan menjadi hal penting. Pelatihan penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi pelaku penyusunan laporan keuangan karena berguna untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi (Febriyanto : 2022). Aparat desa yang kompeten akan dianggap lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan bertanggung jawab.

Tingkat kompetensi pengetahuan dan keahlian memperlihatkan karakteristik yang dimiliki manusia lebih nyata dibandingkan dengan sikap. Sikap merupakan bentuk kompetensi yang lebih tersembunyi dan berada pada titik sentral kepribadian seseorang. Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan ditempat kerja, apa yang dikerjakan tersebut dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing tingkatan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan individu yang diperlukan ditempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara efektif (Kompri, 2017).

Dengan demikian, kompetensi aparat desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui peningkatan kompetensi, aparat desa dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan transparan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) mengenai akuntabilitas vertikal mengenai pertanggung atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tanggung jawab ini sangat erat kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki aparat desa.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian Periansya, & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian Umaira & Adnan, (2019), Sapartingsih, dkk (2018), mengajukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh partisipasi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil uji t bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, karena penelitian menunjukkan Tingkat signifikansi pada literasi keuangan sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H_3) yaitu terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal yang kuat akan membantu mencegah penyalahgunaan dana desa. Ini termasuk pengelolaan akses terhadap dana, pemisahan tugas, dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya kontrol yang efektif, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang baik memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan dapat dipercaya. Ini mencakup prosedur-prosedur untuk pencatatan transaksi dengan benar, pengecekan ulang

terhadap laporan keuangan, dan audit internal secara berkala. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat karena informasi yang disediakan dapat dipercaya.

Sistem pengendalian internal yang efektif juga mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa. Proses pengendalian yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami bagaimana dana desa dikelola dan dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal yang kuat juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan dana desa. Ini melibatkan pelaporan secara teratur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, tentang penggunaan dana dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Sistem pengendalian internal yang baik juga membantu memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang efektif memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi dan keterbukaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat pengawasan serta pelaporan atas penggunaan dana desa.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Dalam rangka mewujudkan unsur SPIP informasi dan komunikasi pemimpin instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk waktu yang tepat. Komunikasi harus efektif untuk itu perlu disediakan dan dimanfaatkan bermacam bentuk dan sarana berkomunikasi. Sistem informasi dikelola dan dikembangkan serta diperbaharui secara berkelanjutan. Apabila lima unsur tersebut terpenuhi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan sangat baik berjalan sesuai peraturan desa.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yesinia et al. (2018), yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal aparatur pemerintah desa memiliki efek positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Diterapkannya sistem pengendalian internal maka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berpengaruh yang signifikan dari partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus: Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran). Berdasarkan hasil uji hipotesis melalui uji regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f, dan uji diperoleh nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak sesuai interpretasi kriteria.
2. Berpengaruh yang signifikan juga dari kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus: Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran). Hal tersebut berdasarkan hasil uji hipotesis melalui uji regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f, dan uji diperoleh nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak sesuai interpretasi kriteria.
3. Berpengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus: Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab.

Pesawaran). Hal tersebut berdasarkan hasil uji hipotesis melalui uji regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f, dan uji diperoleh nilai sig sebesar $0,004 < 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak sesuai interpretasi kriteria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait hasil dan pembahasan dalam penelitian diatas, peneliti menyarankan beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain yakni sebagai berikut:

1. Bagi partisipasi masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Bagi kompetensi kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seseorang tersebut dapat mengerjakan dengan tanggung jawab.
3. Bagi sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya akuntabilitas dana desa melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan dalam pelaporan keuangan, dan pengamanan asset negara.

Daftar Pustaka

- Ali K. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO (Vol. 4, No. 1, pp. 47-56).
- Ali K. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 1.1 (2020): 17-29.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In UMMagelang Conference Series (pp. 266-284).
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Blongkod, H., & Husain, S. P. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1), 130-136.
- Dewi, & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Japlani A. (2022, October). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPM) Universitas Muhammadiyah Metro (Vol. 4, No. 1, pp. 14-23).

- Jayanti, O. S., & Febriyanto, F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Sumbersari). *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(3), 593-602.
- (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Kumalasari, L. (2019). Prngaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilits Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Bayat).
- Lotunani, A., Idrus, M. S., Afnan, E., & Setiawan, M. (2014). The Effect of Competence on Commitment, Performance and Satisfaction with Reward as a Moderating Variable (A Study on Designing Work plans in Kendari City Government, Southeast Sulawesi). *International Journal of Business and Management Invention*, 3(2), 18–25.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). UU No 6 Tahun 2014. In UU No 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Yang Ada Di Desa.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Physical Review B.
- Muslim, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). *Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Novia. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemsos)*, 4(3). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/sosiodev/arti/cle/view/674>
- Nurkhasah at al., (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi MAsyarakat, dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pemerintah Menteri Desa. (2015). *Penetapan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, *Journal of applied microbiology* (2016).

- Pengaruh kompetensi sumber daya, pemahaman, dan pengawasan terhadap kualitas sistem keuangan desa di kabupaten buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Purba, S., Saragih, R., & Sembiring, T. M. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa:(Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanah Pinem). AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 122-129.
- Siswanto, (2021). Manajemen Keuangan.
- Sugiyono, (2017). Buku Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung. Alfabeta.
- Sumampow, M., Tinangon, J., & Tangkuman, S.(2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(32), 194–201
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 3(1), 42389
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Penetapan Pengelolaan Dana Desa Secara Tertip, Efektif, Efisien Ekonomis, Trasparan, Dan Bertanggung Jawab.